



RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Tasikmadu agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2022.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja.

Renja Kecamatan Tasikmadu memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu tahun 2022 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
 20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar No. 129);
 22. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;

24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganya Tahun 2021 nomor 91).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2022.
2. Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;

4. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
5. Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tasikmadu disajikan dalam 4 (Empat) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun Berkenan sebagai berikut

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Tasikmadu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadusampai dengan Triwulan Dua berjalan dengan lancar sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan capaian dan realisasi APBD Kecamatan Tasikmadu sampai dengan triwulan dua bulan juni sebagai berikut:

Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kecamatan Tasikmadu pada triwulan dua Tahun Anggaran 2022 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp.2.587.630.600,- (*Dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.4.980.830.692,- (*empat milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung trealisasi sebesar Rp.1.093.228.876,- (*satu milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam rupiah*),

TABEL 2.1

Evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenan

NO	PROGRAM & KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% FISIK
		PAGU	REALISASI		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.483.417.450			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.394.900	-	0,00	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.895.400	3.718.700	53,92	53,92
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.499.500	2.636.700	47,94	47,94
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000	0		
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	50.000.000	0		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.986.858.968	870.220.810	43,80	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.986.858.968	870.220.810	43,80	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.064.084			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.069.000	858.000	41,47	
	Penyediaan Logistik Kantor	12.603.184	5.236.900	41,55	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.881.900	2.355.000	48,24	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	1.310.000	50,78	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.950.000	12.650.000	66,75	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.980.000	3.940.000	41,22	
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	341.440.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.600.000	9.316.749	41,22	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.840.000	132.150.000	41,45	
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	33.667.500			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.000.000	10.633.317	36,67	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.790.000	2.087.000	26,79	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.877.500			
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	5.142.150			
1.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5.142.150	0	0	0

	Partisipasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.519.950	0	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.622.200	1.027.900	28,38	28,38
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.303.600			
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.331.400			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pereencanaan Pembangunan di Desa	10.931.400	10.931.400	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.400.000	3.650.000	49,32	49,32
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.972.200			
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	9.972.200	3.172.800	31,82	31,82
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	30.960.000	11.000.000	35,53	35,53
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	30.960.000	11.000.000	35,53	35,53
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoneasi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.960.000	11.000.000	35,53	35,53
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.820.000	2.030.200	20,51	20,51
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.820.000	2.030.200	20,51	20,51
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia	9.900.000	2.030.200	20,51	20,51
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	9.920.000	0	0	0
VI	PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.986.000	4.304.000	21,53	21,53
1.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.986.600	4.304.000	21,53	21,53
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.986.600	4.304.000	21,53	21,53
	PAGU	2.587.630.600	1.093.228.876	42,25	42,25

Berdasarkan table di atas terlihat, pada masa tahun anggaran 2022 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan. Sampai dengan bulan Juli 2022 urutan capaian persentase realisasi keuangan program tersaji dalam table berikut ini :

No	NAMA PROGRAM	% REALISASI KEUANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	42,61
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	28,38
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62,73
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	35,53
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20,51
6.	PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21,53

Dari 6 program yang dilaksanakan kantor Kecamatan Tasikmadu pada tahun anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, terlihat realisasi terbesar pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 62,73% dan realisasi paling kecil Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 20,51%

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2022

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 ini dengan menyesuaikan pada terjadinya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terjadi di tingkat Kabupaten dengan tetap memperhatikan arah dan sasaran kebijakan seperti yang termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Adapun rekapitulasi perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/KELUARAN/TOLOK UKUR	ANGGARAN TAHUN 2022						%
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ BERKURANG		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	69 Nilai	2.483.417.450	69 Nilai	2.555.907.700	69 Nilai	72.490.250	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dok	12.394.900	8 Dok	18.378.500	8 Dok	5.983.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	6.895.400	8 Dok	11.050.000	8 Dok	4.154.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pelaksanaan penyusunan dokumen RKA-DPA	1 Keg	5.499.500	1 Keg	7.328.500	1 Keg	1.829.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1 Tahun	1.986.858.968	1 Tahun	1.894.343.236	1 Tahun	(92.509.730)	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	0	
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Sewa Tabah Bangunan Gedung Kantor	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	53.064.084	12 Bulan	85.226.564	12 Bulan	32.162.480	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen listrik dan instalasi kantor	1 Tahun	2.069.000	1 Tahun	5.067.000	1 Tahun	2.998.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peralatan Rumah tangga kantor	12 Bulan	12.603.184	12 Bulan	15.034.564	12 Bulan	2.431.380	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	12 Bulan	4.881.900	12 Bulan	7.230.000	12 Bulan	2.348.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan /koran	12 Bulan	2.580.000	12 Bulan	2.580.000	12 Bulan	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	1 Tahun	18.950.000	1 Tahun	36.900.000	1 Tahun	17.950.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas kantor	1 Tahun	11.980.000	1 Tahun	18.415.000	1 Tahun	6.435.000	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	-		114.900.000	1 Tahun	114.900.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor	2 Unit	-		4.900.000	2 Unit	4.900.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan laptop dan prntr	2 Unit	-		20.000.000	2 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	1 Unit	-		90.000.000	1 Unit	90.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	12 Bulan	341.440.000	12 Bulan	347.720.000	12 Bulan	6.280.000	(0,0005)

Renja Perubahan Kec.Kra Tahun 2022

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	22.600.000	12 Bulan	19.800.000	12 Bulan	(2,800.000)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak Listrik, Air, Telpon dan Wifi Honor tenaga kebersihan, jaga malam, administrasi lainnya	12 Bulan	318.840.000	12 Bulan	327.920.000	12 Bulan	9.080.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	39.667.500	12 Bulan	45.341.400	12 Bulan	5.673.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan bermotor, pajak dll	1 Tahun	29.000.000	1 Tahun	29.000.000	1 Tahun	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, printer, laptop maupun personal computer	1 Tahun	7.790.000	1 Tahun	7.790.000	1 Tahun	0	0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	2.877.500	12 Bulan	8.551.400	12 Bulan	5.673.900	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	5.142.150	100 %	5.142.150	100 %	0	0
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	1 Keg	5.142.150	1 Keg	5.142.150	1 Keg	0	0
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	1 Keg	1.519.950	1 Keg	1.519.950	1 Keg	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pelayanan kepada masyarakat	1 Keg	3.622.200	1 Keg	3.622.200	1 Keg	0	0
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif,	100 %	28.303.600	100 %	28.303.600	100 %	0	0
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	18.331.400	12 Bulan	18.331.400	12 Bulan	0	0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Tahun	10.931.400	1 Tahun	10.931.400	1 Tahun	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat PKK	1 Tahun	7.400.000	1 Tahun	7.400.000	1 Tahun	0	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan kegiatan pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	9.972.200	12 Bulan	9.972.200	12 Bulan	0	0
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Musrenbangkel	1 Keg	9.972.200	1 Keg	9.972.200	1 Keg	0	0
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif kecamatan karanganyar	100 %	30.960.000	100 %	30.960.000	100 %	0	0

	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	100 %	30.960.000	100 %	30.960.000	100 %	0	0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoneasi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pencegahan Covid	1 Tahun	30.960.000	100 %	30.960.000	1 Tahun	0	0
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	100 %	19.820.800	100 %	69.820.800	100 %	50.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	19.820.000	12 Bulan	69.820.800	12 Bulan	50.000.000	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan nasional	1 Tahun	9.900.800	1 Tahun	59.900.800.	1 Tahun	50.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah kegiatan, fkub, mtq,dan keagamaan lainnya	100 %	9.920.000	100 %	9.920.000	100 %	0	0
6.	PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase wilayah tertib Perda kecamatan karanganyar	100 %	19.986.600	100 %	19.986.600	100 %	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Bulan	19.986.600	12 Bulan	19.986.600	12 Bulan		
	PAGU			2.587.630.600		2.710.120.850		122.490.250	

BAB IV

PENUTUP

Selama Tahun Anggaran 2022 secara umum program - program yang telah direncanakan di Kecamatan Tasikmadu sampai dengan tri wulan dua telah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap sasaran srategik dan kegiatan – kegiatan utama pendukung perencanaan sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup berhasil. Dengan keberhasilan ini berarti sebagian besar sasaran yang belum dapat berhasil optimal antara lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tidak optimalnya pencapaian sasaran ini disebabkan oleh beberapa permasalahan - permasalahan yang dihadapi secara umum adalah bahwa peningkatan kualitas SDM sering dihadapkan oleh kebiasaan – kebiasaan yang tidak mendukung budaya kerja yang baik dan kurang mendukung bagi peningkatan profesionalisme. Oleh karena itu untuk perubahan tidak dapat dicapai secara instan melainkan harus melalui proses panjang dengan beberapa langkah pembinaan yang berkelanjutan.

Dari segi anggaran secara umum dapat berjalan tetapi akan lebih efektif jika anggaran untuk unit kerja Pemerintahan Kecamatan benar – benar mengacu pada sistem anggaran kinerja sepenuhnya dan bukan sekedar penyeragaman anagaran Kecamatan dalam satu Kabupaten karena kebutuhan anggaran masing masing Kecamatan berbeda tergantung kondisi wilayahnya.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Perubahan tahun 2022 ini kami sampaikan untuk menjadikan pemeriksaan.

Karanganyar, Oktober 2022
CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO, SP
NIP.197009091994031004

